

Kontestasi Kepemimpinan GLOBAL AS dan China DAN MASA DEPAN DIPLOMASI EKONOMI RI

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

Pax Americana berakhir?

- Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan ekonominya yang terkesan proteksionist, menimbulkan spekulasi apakah kepemimpinan global AS dalam tatanan ekonomi global yang liberal berakhir?
- Bangkitnya Tiongkok sebagai raksasa ekonomi baru memunculkan pertanyaan system nilai apa yang akan mendasari kepemimpinan global Tiongkok?
- Bagaimana dampaknya terhadap masa depan diplomasi ekonomi RI?

Tinjauan historis pax americana

- Pasca Perang Dunia II AS dan Sekutu Barat membangun arsitektur ekonomi politik global untuk menjamin dominasinya melalui instrumentalisasi Bretton Woods Institutions (IMF, World Bank dan GATT/WTO).
- Kombinasi kekuatan ekonomi AS dan nilai-nilai liberal termasuk liberalisasi perdagangan merupakan strategi AS untuk menjalankan hegemoni global meskipun sejak 1970an semakin tersaingi oleh Jepang dan Eropa Barat (Uni Eropa sejak 1990an).

- Dengan kemenangan Donald Trump orang akan mempertanyakan bagaimana kelanjutan policy AS terkait peranan lembaga-lembaga Bretton Woods sementara peranan Tiongkok dalam lembaga-lembaga tersebut mulai diperhitungkan secara serius.
- Pada saat yang sama Tiongkok muncul dengan inisiatif baru baik melalui kerjasama BRICS maupun pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung Belt and Road Initiative (BRI) yang akan memperluas sphere of influence Tiongkok.

- Teori yang mendasari kepemimpinan global AS adalah kompatibilitas antara system demokrasi liberal dengan rezim internasional baik ekonomi maupun politik keamanan yang didasarkan pada nilai-nilai liberal.
- Dalam bukunya yang berjudul *Pax Sinica: Geopolitics and Economics of China's Ascendance*, Y.Y. Kueh berargumen bahwa Pax Americana belum tergantikan dan alternatif yang lain seperti Pax Sinica mengandung kelemahan intrinsik untuk mengemban tugas kepemimpinan global.

- Sistem politik partai tunggal Tiongkok sangat jauh beda dan bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal. Secara ekonomi Tiongkok sudah terlibat jauh dalam liberalisasi perdagangan baik di tingkat multilateral melalui WTO maupun skala regional seperti *China - ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)*.
- Teori apakah yang mendasari kepemimpinan global Beijing? Kredensial apa yang dimiliki Beijing untuk mendesak negara-negara lain di bawah kepemimpinannya mematuhi norma-norma kemanusiaan yang bersifat universal?
- Rusia dan Tiongkok agak gamang untuk mengambil alih kepemimpinan dalam penyelesaian konflik di Suriah karena orientasi ideologis yang tidak jelas dalam strategi keduanya.

- Kepemimpinan global AS yang bernuansa liberal ditunjang oleh aktivisme jejaring masyarakat sipil internasional (*transnational civil society networks*) dalam berbagai isu seperti demokrasi, HAM, gender, lingkungan hidup, dialog antar iman, keadilan sosial dan kemiskinan.
- Meskipun sering terjadi antagonisme antara AS dengan berbagai NGO internasional ini namun dalam satu hal kedua pihak sepakat bahwa negara tidak boleh mengekang apalagi menindas hak-hak sipil rakyat.
- Negara dan *civil society* yang sama-sama memperjuangkan kepentingan publik (*public goals*) harus berbagi dalam merawat dan menjaga keadaban (*civility*) dalam ruang publik (*public sphere*) demi menghormati martabat kemanusiaan (*human dignity*).

Bagaimana Sikap Indonesia Menghadapi Persaingan As Dan Tiongkok?

- Sikap agresif Tiongkok di LTS yang berbarengan dengan sikap Donald Trump yang terkesan ingin “mundur” dari Asia membuat sekutu-sekutu AS di wilayah ini seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia mulai khawatir tentang isu kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di LTS yang merupakan jalur perdagangan strategis bagi ketiga negara tersebut.
- Mengingat pola konflik teritorial dan historis di Asia Timur, Jepang juga cemas tentang implikasi jangka panjang kebijakan *inward-looking* Donald Trump. Pada saat yang sama Korea Selatan masih membutuhkan perlindungan AS terhadap ancaman nuklir Korea Utara.

- Masih terlalu dini untuk memastikan apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump dengan politik luar negeri AS di Asia Pasifik. TPP (*Trans-Pacific Partnership*) yang tadinya diandalkan oleh Presiden Barack Obama sebagai pilar perdagangan dan investasi AS dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Asia telah ditinggalkan oleh Donald Trump.
- RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) sebagai kerjasama perdagangan yang lebih longgar dan akomodatif diperkirakan akan terus dipromosikan dan bahkan Tiongkok tampil sebagai pendukung utama rencana yang lebih luas dan inklusif yaitu FTAAP atau *Free Trade Area of the Asia Pacific*.

- Mencerermati perubahan lingkungan strategis di atas, apa yang harus dilakukan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif? Dari pemaparan di atas jelas terlihat daya tarik Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga strategis keamanan.
- Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan menjadi sangat penting (*indispensable*) karena berpeluang tampil sebagai inisiator pemeliharaan stabilitas keamanan regional yang dibutuhkan semua pihak.

- Dalam konteks ini Indonesia yang berprinsip menjaga jarak yang sama (*equal distance*) dengan kekuatan-kekuatan besar memiliki *soft power* untuk memainkan peran yang konstruktif di tengah kegalauan negara-negara tetangganya.
- Dalam kaitan ini doktrin keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) yang pernah dilontarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tetap relevan untuk digunakan.

Catatan Penting Untuk Indonesia

- Pertama, konsistensi Indonesia dengan prinsip ini justru menjadikannya sebagai mitra terpercaya (*credible partner*) dan dapat diterima semua pihak.
- Kedua, dalam konteks kekinian prinsip bebas aktif tidak lagi dibingkai dalam pertentangan ideologis kapitalisme versus komunisme, tetapi kombinasi yang cerdas antara kekayaan imajinatif tradisi politik luar negeri warisan Mohammad Hatta dan optimalisasi pencapaian kepentingan nasional.

- Ketiga, melalui rangkaian pertemuannya dengan pimpinan Beijing dan Washington tampaknya Presiden Joko Widodo telah cukup piawai mengelola politik luar negeri bebas aktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi.
- Keempat, meskipun ada upaya memecah-belah ASEAN, Indonesia harus tetap mempertahankan kompatibilitas antara politik luar negeri bebas aktif dan kapitalisasi platform regional ASEAN demi meningkatkan daya tawar terhadap kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini.
- Akhirnya, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Donald Trump di Asia Pasifik justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peranan yang konstruktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingannya.

TERIMA KASIH